

Notulensi Workshop

Anggota Legislatif dan Pemenuhan Hak Ekosob di Kota Surakarta

Hari Tanggal : **Jumat, 07 Agustus 2009**
Jam : **13.00 – 16.30 WIB**
Agenda : *Terlampir*
Tempat : **Hotel Indah Palace (HIP)**
Jl. Veteran No. 284 Solo

Acara dimulai pada pukul: 14.00-16,30 wib

Pembukaan:

Dibuka oleh ketua event organiser Ifazah dari PATTIRO Surakarta:

Assalamu'alaikum. Salam sejahtera bagi kita semua sehingga kita dapat bertemu dalam workshop Anggota Legislatif dan Pemenuhan Hak Ekosob di Kota Surakarta. Terimakasih kepada bapak ibu legeslatif dan calon legeslatif terpilih, saudara yang telah bersedia hadir dalam diskusi kali ini. Selanjutnya akan saya berikan kepada manager program Pattiro surakarta. Kepada mas setyo waktu dan tempat saya persilahkan.

Moderator:

Setyo Dwi Herwanto, S.S:

Assalamu'alaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Sambil menunggu peserta yang lain yang belum datang, kita mulai saja acara hari ini. Kepada bapak ibu sekalian yang telah datang dalam diskusi pada hari ini. workshop pada hari ini Pemenuhan Hak Eksosob di Kota Surakarta, sesuai dengan TOR yang telah kami sampaikan bahwa narasumber pada workshop pada siang hari ini yang pertama bapak Drs. H. M. Dian Nafi', M.Pd pengasuh ilmu ayat Pindan, yang kedua adalah ibu dr. Siti Wahyuningsih M.Kesa kepala dinas kesehatan surakarta , dan yang ketiga adalah direktur Pattiro Surakarta dan Alif Basuki, S.Sos.I. Untuk menyingkat waktu, sesuai TOR yang kami kirimkan, kami persilahkan kepada pembicara yang pertama bapak Drs. H. M. Dian Nafi', M.Pd.yang akan memaparkan tentang “Hak Ekosob dan Tugas-tugas Legislatif” waktu dan tempat kami persilahkan.

Drs. H. M. Dian Nafi', M.Pd “Hak Ekosob dan Tugas-tugas Legislatif”

Ass. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga kita dapat bertemu dalam diskusi hari

ini. Yang pertama saya ucapkan terimakasih kepada pattiro karena kesempatan yang diberikan. bagaimana menggugah kebutuhan bersama dalam pemenuhan kebutuhan kota surakarta sangat penting bagi kita untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan masyarakat surakarta pada khususnya. Kesempatan ini dengan tema Legislatif dan Pemenuhan Hak Ekosob di Kota Surakarta ini berkaitan dengan kita secara personal maupun bagi calon legeslatif terpilih untuk mengadakan penataran dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Persoalan yang sangat mendesak bagi warga Negara Indonesia adalah pemenuhan kebutuhan hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ada 11 hal yang menjadi ekosop termasuk air bersih, jika ini termasuk kewajiban..maka yang menjadi pemanggul kewajiban adalah rakyat, jika menjadi hak rakyat maka yang menjadi pemanggul kewajiban adalah pemerintah. Dalam hal kesehatan, bagaimana pemenuhan kebutuhan akan kesehatan ibu hamil sebelum dan sesudah melahirkan, dalam hal pendidikan bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat denagan satandar pendidikan kita. Bagian apa saja yang menjadi hak bagi rakyat, dan apa yang menjadi kewajiban pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan.

(materi memahami hak ekosob terlampir).

- **Bagian III**, memuat jaminan hak-hak warga negara:

- 1) Hak atas pekerjaan;
- 2) Hak mendapatkan program-program pelatihan teknis dan vokasional;
- 3) Hak untuk mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik;
- 4) Hak untuk membentuk serikat buruh;
- 5) Hak untuk menikmati jaminan sosial, termasuk asuransi sosial;
- 6) Hak untuk menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan;
- 7) Hak atas standar hidup layak, termasuk pangan, sandang, dan perumahan;
- 8) Hak untuk terbebas dari kelaparan;
- 9) Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi;
- 10) Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma;
- 11) Hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya dan menikmati keuntungan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya

1. hak untuk mendapatkan pekerjaan, pemerintah harus menyediakan pelatihan dan perluasan lapangan kerja sehingga tidak ada ada lagi pengangguran.

2.saya sangat bersyukur bahwa ada pengumuman dari dari hak mendapatkan program-program pelatihan teknis dan vokaional : sebagai contoh buruh: ada hal-hal normatif yang menjadi hak buruh, penyediaan tempat dalam melaksanakan beribadat bagi orang cacat ditempat peribadatan, Termasuk hak no.6 hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan. Pemenuhan

kebutuhan ibu yang sedang dan setelah melahirkan menyangkut kesehatan ibu dan anak.

- **Bagian IV**, memuat kewajiban Negara Pihak yang telah meratifikasi Kovenan untuk melaporkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam pemenuhan Hak Ekosob ke Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Ekosob.
- **Bagian V**, memuat ratifikasi Negara Pihak. (Indonesia mengesahkan/meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, tanggal 28 Oktober 2005). Negara Wajib Menyampaikan Laporan kepada Komite Hak Ekosob dengan 7 Tujuan (Komentar Umum Nomor 1)
- **Pertama**, memastikan bahwa Negara Pihak melaksanakan pengujian komprehensif terhadap per-UU-an nasional, aturan, prosedur dan praktik penyelenggaraan negara dalam rangka menyamakan sebisa mungkin dengan Kovenan.
- **Kedua**, memastikan bahwa Negara Pihak secara berkala memantau situasi yang sebenarnya dengan menghormati setiap hak yang disebutkan dalam Kovenan dalam rangka mengukur sejauhmana hak tersebut dapat dinikmati oleh semua individu dalam Negara tersebut.
- **Ketiga**, memberikan dasar bagi uraian pemerintah mengenai kebijakan yang dinyatakan dengan jelas dan ditargetkan secara hati-hati dalam menerapkan Kovenan.
- **Keempat**, memfasilitasi penelitian masyarakat mengenai kebijaksanaan pemerintah menyangkut peneraan Kovenan, dan mendorong keterlibatan semua bagian masyarakat dalam merumuskan, menerapkan dan melakukan pengujian terhadap relevansi suatu kebijakan.
- **Kelima**, memberikan dasar agar baik negara Pihak maupun Komite dapat mengevaluasi secara efektif kemajuan ke arah perwujudan atas kewajiban yang terdapat dalam Kovenan.
- **Keenam**, memberi kesempatan kepada Negara Pihak untuk mengembangkan pengertian yang lebih baik mengenai masalah dan krisis yang mengancam pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya.
- **Ketujuh**, memfasilitasi pertukaran informasi di antara Negara Pihak dan membantu mengembangkan pengertian lengkap atas persoalan bersama dan jalan keluar yang mungkin dilakukan dalam penerapan setiap hak yang terdapat dalam Kovenan.

Demikian yang saya sampaikan, agar Negara mengetahui apasaja yang menjadi hak dan kebutuhan masyarakat agar kemajuan ekonomi social budaya masyarakat surakarta dapat terpenuhi dan standart pelayanan minimum (SPM), hal ini untuk mengetahui batasan-batasan yang jelas dalam pemenuhan hak dari masyarakat, dan menghindari suatu kegagalan Negara yang disebabkan tidak dapatnya negara memenuhi hak masyarakatnya. Beliau juga menerangkan mengenai perlunya suatu keseimbangan

pengalokasian dana agar tidak terjadi suatu ketimpangan anggaran.

. Waktu saya kembalikan kepada moderator.

Moderator: Terimakasih, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan tentang kesehatan bersama dr Siti Wahyuningsih, M.Kes. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta tentang “Pemenuhan Hak Kesehatan di Kota Surakarta”

dr Siti Wahyuningsih, M.Kes. ass. Yang saya hormati para hadirin, pertama-tama saya ucapkan termakasih kepada pattiro surakarta pemenuhan hak ekosop dalam hal kesehatan, kami beberapa kali mengadakan pengarahan dalam pemenuhan kebutuhan hak kesehatan dikota surakarta. Kami menyediakan asuransi gold bagi keluarga miskin dan silver dari keluarga miskin dengan vasilitas rumah sakit kelas tiga dengan pengobetan paket Obat-obatannya sesuai vormalium. Drajad kesehatan masyarakat adalah paling penting dari suatu bangsa, jika suatu bangsa semuanya sehat dan pintar maka kemajuan bangsa aka tercapai. Uantuk bidang kesahatan, bidang pelayanan dasar yang dilaksanakan harus saling bersinergi, untuk program kesehatan bagi masyarakat .pemerintah menyelenggarakan jampimaskin , sehingga masyarakat memiliki payung dalam pemenuhan kesehatan, standar pelayanan minimal telah kami ajukan karena kita mengharap pemenuhan kesehatan masyarakat akan terpenuhi, untuk system pelayanan dasar, kita sudah membuat jaminan kesehatan kita namai jaminan kesehatan masyarakat kota surakarta (jamkesmas), jamkesmas jamkesda dan jamkesprov harus bersinergi, dikota surakarta kami sudah muncul perda sehingga melindungi keehatan masyrakatnya. Untuk anggaran kesehatan pemeliharaan kesehatan masyarakat surakarta (PKMS) tahun 2008 adalah 16 M dan pada tahun 2009 12M . (*materi Alokasi APBD kota untuk maskin terlampir*)

Moderator: demikian penyampaian tentang pemenuhan kesehatan dari dr Siti Wahyuningsih, M.Kes kepala dinas kesehatan kota surakarta, selanjutnya dari direktur Pattiro surakarta yang akan menjelaskan tentang angka-angka. kepada Alif Basuki, S.Sos.I waktu dan tempat kami persilahkan.

Alif Basuki, S.Sos.I “Gambaran Kemiskinan di Kota Surakarta”

Ass. Selamat sore, terimakasih kepada saudara moderator. Pertama2 saya mengucapkan selamat bagi para pemenang pemilu 2009, serta para hadirin yang terhormat. Saya hanya ingin memaparkan gambaran perumusan hak ekosop sangat penting bagi pembahasan budgeting dalam merumuskan kebijakan. Bagaimana perspektif hak ekosob adalah sesuatu yang harus tertuang dalam ekosob, dalam hal ini fungsi legeslatif kedepan dalam menentukan dalam proses

budgeting. Bagaimana hak eksoib dikaitkan dengan kemiskinan. Kombinasi dari perspektif

kebijakan dalam struktur (materi) Mengapa Anggaran Pro Rakyat Miskin. (*materi PRO POOR BUDGET terlampir*) Arkeologi Anggaran Pro Poor.

Moderator: demikian pemaparan dari mas Alif selaku direktur Pattiro surakarta yang telah memberikan gambaran angka-angka sebagai bageting dalam menentukan anggaran sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat kota surakarta. Untuk selanjutnya akan kita adakan dialog, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan kepada para pembicara, kami berikan tiga pertanyaan.

Dialog...

1. ibu Mariasri sumarli (P.golkar) : terimakasih , kepada P.dian : antisipasi pemenuhan kebutuhan air bersi dikota kedepan bagaimana?
2. b.nunung PT.PAS, sangat menarik, karena sampai detik ini kebutuhan masyarakat belum terpenuhi secara benar, terbukti masih ada temen –temen buruh yang berunjuk rasa menuntut kenaikan upah yang terus terang masalah ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan khususnya bagi kaum buruh, Kepada dinas kesehatan , kenapa harus Gold kenapa harus silver kalau memang hak rakyat kenapa harus ada pelayangan yang berbeda.
3. nurhidayah Muslimat NU, di masyarakat tidak ada penjelasan terhadap masyarakat tentang ada tidaknya anggaran pemenuhan kesehatan masyarakat.

1. Drs. H. M. Dian Nafi', M.Pd.

Yang pertama tentang perspektif hak dan kebutuhan,, bagi kita untuk melihat apakah pemenuhan kebutuhan sudah terlaksana dengan benar atau belum , dapat kita lihat dari kemajuan cara berfikir kita. Orang yang berfikiran kedepan memiliki tiga unsur dalam berfikir, antara lain: 1. melihat / membentuk kedepan: mau melihat apa yang akan kita lakukan dimasa depan, 2. Negara mewajibkan pemerintah: 3. regulative:

Cont. Jika seseorang hidup dalam Negara tidak memiliki pemimpin yg tegas, tidak adanya pasar jejeg, tidak ada lagi sungai yang airnya mengalir, hakim tidak adil dan dokter tidak berkompeten. Maka kita hidup dalam kesia-siaan. Bagai mana kita bias maju jika memiliki pemimpin yang tidak tega, maka bangsa ini akan mudah dijajah dengan bangsa lain baik dalam kenyataan maupun ekonomi, yang kedua pasar jejeg artinya dimana sebuah Negara mampu menggerakan roda perekonomian dan berdampak baik bagi masyarakatnya sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, yang

ketiga regulative yaitu segala sesuatu diserahkan kepada rakyat dan pemerintah mengawasi jalannya roda perekonomian, regulative bukan liberalis maupun kerakyatan yang pemerintah tidak ikut campur dalam pengaturan perekonomian,

Antisipasi: lebih baik menciptakan masyarakat untuk mengatasi masalah daripada membuat wakil untuk mengatasi masalah.

2. dr Siti Wahyuningsih, M.Kes.

sejauhmana intervensi di kes terhadap makanan kadaluarsa: sudah diadakan sosialisasi ke sekolah, penerbitan perijinan. Tentang makanan yang dilarang, pewarna makanan yang berbahaya dan yang lainnya. Diskes telah berupaya dalam penanggulangan makanan berbahaya yang bekerja sama dengan Badan POM dan masyarakat. yang jadi masalah adalah dengan penjaja makanan keliling yg sering berpindah-pindah tempat sehingga menyulitkan dalam pemantauan. Untuk kesehatan kita sangat membutuhkan kerja sama baik dari pemerintah, dinas dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah. Karena kegiatan di kes tidak nampak mata contohnya diskes selama ini hanya melakukan pembinaan-pembinaan, itu tak terlihat walaupun kami sudah melakukannya.

Untuk silver dan gold harus dipisahkan, karena untuk penduduk miskin kita kasih gold, dan yang mampu kami berikan silver. Yang membedakan adalah haknya saat menjalani pengobatan. Sehingga masyarakat kurang mampu dapat memperoleh jaminan kesehatan dan mendapatkan fasilitas pengobatan kelas tiga dirumah sakit dan mendapatkan paket obat-obatan dari vormalium yaitu jenisnya lebih bagus dari pada obat yang beredar.

Penyuluhan lewat dinas kesehatan, kita memiliki siasat yaitu dengan mengadakan penyuluhan berkala, penerangan- penerangan, sudah kami laksanakan. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih.

Moderator: baiklah demikian jawaban yang dijelaskan para pembicara pada hari ini, semoga apa yang telah kita lakukan demi pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat surakarta. Karena waktu sudah cukup sore maka diskusi kali ini, Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada para nara sumber dan para hadirin yang telah bersedia datang dalam workshop hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf, sekian dan terimakasih, Wassalam. Mohon itu diluar masih ada makanan silahkan dinikmati,